

PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Alifah Muizatul Abdilah¹, Astuti Darmiyanti²

Email: 2110631110080@student.unsika.ac.id¹, astuti.darmiyant@fai.unsika.ac.id²

Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab kepala satuan pendidikan, meningkatkan kompetisi sehat antar satuan pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dan pemerataan pendidikan di daerah dalam implementasi MBS, tujuan utama adalah meningkatkan mutu sekolah dengan memfokuskan pada tiga pilar utama, yaitu manajemen sekolah, proses pembelajaran, dan peran masyarakat di sekolah. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat meningkatkan mutu pendidikan. MBS adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang yang berlaku. Terdapat 5 prinsip pelaksanaan MBS antara lain: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Meningkatkan Mutu Pendidikan, Sekolah Menengah Atas.

ABSTRACT

This study aims to increase the awareness of school residents and the community in the implementation of education, increase the responsibility of the head of the education unit, increase healthy competition between education units, and increase the efficiency, relevance, and equity of education in the regions in the implementation of SBM, the main objective is to improve school quality by focusing on three main pillars, namely school management, the learning process, and the role of the community in schools. The implementation of School Based Management (SBM) in Senior High Schools (SMA) can improve the quality of education. SBM is a management model that provides autonomy and flexibility to schools while encouraging direct participation of school residents (teachers, students, principals, employees) to improve school quality based on national education policies and applicable laws and regulations. There are 5 principles of SBM implementation, including: independence, partnership, participation.

Keywords: School-based management, improving the quality of education, high school.

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, dan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan tanggung jawab bidang pendidikan, terutama mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang semakin berperan dalam menampilkan dirinya yang memiliki kompetensi, tangguh, kreatif, mandiri dan profesional. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia tersebut, karena peningkatan sumber daya manusia tidak bisa dipisahkan dengan proses peningkatan mutu Pendidikan. Pendidikan menjadi peran utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bagus akan berdampak kepada meningkatnya mutu pendidikan (Hendrizar, 2020). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka semua pihak harus bekerja bersama-sama saling bahu-membahu, baik itu dari pemerintah maupun dari non pemerintah atau swasta. Sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003, fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat pada pasal 3 yang mana tujuannya ialah untuk membentuk watak yang bermartabat, cerdas, beriman kepada YME sehingga menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Guna meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi warga sekolah dan masyarakat, maka diperlukan pengelolaan satuan pendidikan yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 27 disebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan anak usia dini dan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Hal ini juga didukung dengan adanya otonomi daerah yang memberikan wewenang dalam mengelola sekolah lebih mandiri. Kemandirian sekolah diharapkan dapat mengembangkan program-program sesuai dengan keperluan dan potensi yang dimiliki (Veithzal & Murni, 2009). Pelaksanaan manajemen disekolah dapat dilaksanakan melalui Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah atau singkatan dari MBS, ditandai dengan adanya wewenang atau otonomi sekolah secara penuh terkait pelayanan disekolah baik secara internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan disekolah, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan (Rizka Azhara, 2022). Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan membahas tentang penerapan MBS di sekolah menengah atas dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, tantangan yang dihadapi dalam penerapan MBS di sekolah menengah atas dan manfaat dari penerapan MBS di sekolah menengah atas. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat luas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan siswa, guru, dan komite sekolah. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan sikap responden terhadap topik yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh data kualitatif tentang penerapan MBS di sekolah menengah atas dan

bagaimana penerapannya dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan siswa, guru, dan komite sekolah yang terlibat dalam penerapan MBS di sekolah menengah atas.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam dan detail tentang topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam akan membantu penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penerapan MBS di sekolah menengah atas dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Selain itu, wawancara mendalam juga akan membantu penulis untuk memperoleh informasi tentang manfaat dari penerapan MBS di sekolah menengah atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan MBS Di Sekolah Menengah Atas Dapat Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah

Penerapan MBS dalam proses peningkatan mutu yang berbasis pada sekolah, yaitu melalui partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, murid, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan sekolah. (Viethzal Rivai dan Sylviani Murni, hlm.171- 173). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang yang berlaku¹. MBS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab kepala satuan pendidikan, meningkatkan kompetisi sehat antar satuan pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dan pemerataan pendidikan di daerah¹.

Penerapan MBS di sekolah menengah atas (SMA) dilakukan dengan menerapkan 5 prinsip pelaksanaan MBS:

1. **Kemandirian Sekolah:** Sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Sekolah diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya kemandirian melalui berbagai cara seperti mengembangkan unit-unit usaha sekolah, membangun kerja sama dengan pihak lain dalam bidang komersial, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pemasukan pendanaan dan peningkatan program sekolah.
2. **Kemitraan:** Prinsip kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Esensi kemitraan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dari masyarakat baik berupa dukungan moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah sesuai kategori sekolah. Pastikan kemitraan yang terjalin saling menguntungkan dan bersifat sejajar.
3. **Partisipasi:** Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Konteks partisipasi dalam implementasi MBS antara lain dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah.

¹ Ardiansyah, Dirjo and Mujakir, Mujakir and Fathan, Akhmad Reza and Sutanto, Purwadi and Suhadi, Suhadi. (2018). Manajemen berbasis sekolah: sekolah menengah atas. Profil SMA. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Jakarta

4. Keterbukaan: Keterbukaan dalam MBS dapat diartikan sebagai sikap terbuka dan transparan dalam mengelola sekolah. Keterbukaan ini dapat diwujudkan dalam bentuk publikasi laporan keuangan, publikasi kebijakan sekolah, dan lain-lain.
5. Akuntabilitas: Akuntabilitas dalam MBS dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban kepala sekolah dan warga sekolah terhadap hasil kinerja sekolah. Pertanggungjawaban ini dapat diwujudkan dalam bentuk evaluasi kinerja, evaluasi program, dan lain-lain.

2. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penerapan MBS Di Sekolah Menengah Atas

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah menengah atas (SMA) dapat bervariasi, mulai dari manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen hubungan masyarakat, hingga manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Untuk mengoptimalkan penerapan MBS, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain melalui pengembangan instrumen evaluasi MBS, meningkatkan peran serta pemerintah kabupaten/kota, memberdayakan komite sekolah, dan memaksimalkan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Banyak ahli dari beberapa penelitian sebelumnya telah mendefinisikan konsep manajemen berbasis sekolah secara beragam. Akan tetapi, pada hakikatnya hal tersebut memiliki makna yang sama. Menurut Myers dan Stonehill (1993) manajemen berbasis sekolah merupakan strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada perangkat sekolah untuk memiliki kontrol dalam proses pendidikan. Terlepas dari itu, agar manajemen berbasis sekolah dapat terlaksana secara optimal diperlukan strategi yang disesuaikan dengan memperhatikan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan dari masing-masing sekolah. Sebab, tingkat kemampuan manajemen antara sekolah satu dengan yang lainnya menunjukkan tingkat variasi yang berbeda-beda. Ada sekolah yang dapat melaksanakan manajemen berbasis sekolah secara penuh, sebagian, dan/atau terbatas. Kondisi demikian menyangkut pada sumber daya yang tersedia sehingga dalam pengorganisasiannya memerlukan perangkat dan strategi tertentu. Oswald (2014) berpendapat agar manajemen berbasis sekolah berjalan sukses perlu memperhatikan beberapa strategi, yaitu (1) pengambilan keputusan oleh kepala sekolah harus mengedepankan pendekatan kelompok; (2) guru harus mendukung kepemimpinan sekolah dan lebih terlibat untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah; (3) orang tua beserta masyarakat harus menjadi penyokong sekolah. Sementara itu, Pratiwi (2016) menyatakan terdapat enam strategi dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, antara lain (1) menetapkan peran penting guru dalam kelompok pengambil keputusan; (2) fokus pada perbaikan berkelanjutan dengan pelatihan sekolah secara luas dalam memfungsikan dan memproses keahlian, seperti bidang kurikulum dan pengajaran; (3) membuat sistem yang baik untuk berbagi informasi tentang luasnya hubungan sekolah diantara para pemilih; (4) mengembangkan cara-cara yang lebih efektif dalam memberi penghargaan sebagai orientasi pendekatan staf ke arah tercapainya tujuan sekolah; (5) menyeleksi kepala sekolah yang dapat merubah dan memudahkan manajemen; dan (6) digunakan di daerah namun tetap mengacu pada pemerintah sebagai garis pedoman untuk memusatkan usaha dalam mempersatukan kembali dan merubah target dalam kurikulum dan pengajaran. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, diketahui bahwa strategi yang sama untuk setiap sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis

sekolah tidak dapat diberlakukan sama karena lingkungan internal dan eksternal sekolah yang berbeda untuk setiap sekolah. Hanya saja setiap sekolah tetap dapat berusaha untuk mengkondisikan strategi yang ditawarkan agar dapat diterapkan melalui sumber daya yang tersedia, sehingga memperoleh hasil yang maksimal dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. WalauPun demikian, tantangan atau kendala yang dihadapi setiap sekolah dalam menerapkan kebijakan manajemen berbasis sekolah tentu berbeda-beda bergantung pada kondisi, kemampuan, kebijakan daerah, budaya serta keadaan lingkungan yang ada di sekitar sekolah tersebut. Sehingga strategi yang ditawarkan sebagai solusi untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut pun bervariasi, dan hal tersebut disesuaikan dengan memperhatikan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan dari masing-masing sekolah sebagai pihak penyelenggara pendidikan.

3. Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah merupakan hasil terjemahan dari School Based Management (SBM) adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada Kepala Sekolah dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Depdiknas (2003), Manajemen berbasis sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama/partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. MBS juga dikatakan sebagai suatu proses mengelola seluruh aktivitas yang ada disekolah dengan melibatkan seluruh Tumpukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (Setyaningsih, R., Suci, A. N., & Puspasari, 2021). Manajemen berbasis sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada termasuk partisipasi masyarakat sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan dan akuntabel secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif tanpa mengesampingkan tujuan Pendidikan Nasional. Hal ini berarti sekolah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah sehingga mutu pendidikan berubah kearah yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi yang mendorong sekolah untuk mengambil keputusan secara transparan, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat.

4. Manfaat Dari Penerapan MBS Di Sekolah Menengah Atas

Menurut Subakir dan Sapari (2001), tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah, dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri.

Sedangkan menurut Mulyasa (2006), tujuan manajemen berbasis sekolah yaitu:

1. **Peningkatan efisiensi**, antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.
2. **Peningkatan mutu**, antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.
3. **Peningkatan pemerataan**, antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi

masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Pelaksanaan MBS di sekolah bermanfaat untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Menurut Depdiknas (2000), manfaat manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut:

1. Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga dia dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
4. Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.

5. Konsep dan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Depdiknas (2005), konsep dasar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah:

1. Otonomi. Otonomi adalah kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik.
2. Kemandirian. Kemandirian adalah langkah dalam pengambilan keputusan, tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, mengambil strategi, dan metode dalam memecahkan persoalan yang ada, sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang yang ada.
3. Demokratis. Demokratis adalah keseluruhan elemen elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen elemen sekolah.

Terdapat empat prinsip dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah, yaitu: prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri dan prinsip inisiatif sumber daya manusia.

a. Prinsip Ekuifinalitas (*Principle of Equifinality*)

Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen Sekolah menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing.

b. Prinsip Desentralisasi (*Principle of Decentralization*)

Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah

masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya.

- c. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (*Principle of Self-Managing System*)
Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ekuifinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah.
- d. Prinsip Inisiatif Manusia (*Principle of Human Initiative*)
Berdasarkan perspektif ini maka Manajemen Sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek sumber daya manusianya. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis.

6. Komponen Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Mulyasa (2006), terdapat tujuh komponen yang harus dikelola dengan baik dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yaitu sebagai berikut:

- a. Manajemen kurikulum
Manajemen kurikulum merupakan kegiatan yang dititikberatkan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didik, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
- b. Manajemen kesiswaan
Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.
- c. Manajemen guru
Keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga guru yang tersedia di sekolah. Manajemen tenaga guru bertujuan untuk mendayagunakan tenaga guru secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.
- d. Manajemen keuangan dan pembiayaan
Keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen yang lain. Manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan
Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi: perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana dan

prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana dan pengawasan sarana dan prasarana.

f. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat

Hubungan masyarakat adalah kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar mereka mendukungnya dengan sadar dan sukarela. Kegiatan hubungan masyarakat yang dilakukan yaitu dengan memberikan informasi dan penerangan untuk memberikan pemahaman di kalangan masyarakat luas tentang tugas-tugas dan fungsi yang diemban lembaga pendidikan, termasuk mengenai kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan masyarakat luar.

g. Manajemen layanan khusus

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Perpustakaan sekolah sebagai sarana pendidikan yang sangat penting harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus lainnya adalah layanan kesehatan dan keamanan. Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Di samping itu, sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para guru yang ada di sekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana diatas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yakni: Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. MBS memberikan kewenangan yang besar kepada sekolah dalam pengambilan suatu keputusan, sehingga pengambilan keputusan yang diambil di sekolah terhadap pendidikan menjadi lebih berkualitas. Tujuan dari penerapan MBS di SMA adalah untuk memberikan sekolah kewenangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada profil sekolah yang sesungguhnya, dan mengacu pada harapan-harapan yang akan dicapai yang bersumber dari warga sekolah, orang tua, dan masyarakat dengan memperhatikan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki sekolah. Manfaat dari penerapan MBS di SMA antara lain: memperkenankan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan dapat meningkatkan pembelajaran, memberikan kesempatan kepada komunitas sekolah (guru, staf sekolah, orang tua dan masyarakat) dalam keterlibatan mengambil keputusan kunci (prioritas), meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya sekolah, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan MBS di SMA antara lain: kurangnya pemahaman tentang konsep dan prinsip MBS, kurangnya dukungan dari pihak sekolah, kurangnya dukungan dari pihak masyarakat, kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, dan kurangnya dukungan dari pihak swasta. Konsep dan prinsip MBS antara lain: kemandirian sekolah, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Komponen MBS antara lain: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Dirjo, Mujakir, Fathan, Sutanto, Purwadi, & Suhadi. (2018). Manajemen berbasis sekolah: sekolah menengah atas. Profil SMA. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
- Depdiknas. (2003). Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2000). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen pendidikan nasional. (2005). Paket pelatihan 1, peningkatan mutu pendidikan dasar melalui manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat, pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Jakarta: Depdiknas.
- Hendrizal. (2020). Problems of basic students' learning interest and solutions. *Jurnal CERDAS Proklamator*, 8(2), 86–97.
- Mulyasa. (2006). Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Myers, D., & Stonehill, R. (1993). School-Based Management. *Education Research Consumer Guide*, Number 4. Washington DC: Office of Educational Research and Improvement (ED)1
- Oswald, L. (2014). *School-Based Management: Rationale and Implementation Guidelines* (2nd ed). CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Pratiwi, S. N. (2016). Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 86–96. <https://dx.doi.org/10.30596/edutech.v2i1.578>
- Rivai, V., & Murni, S. (2010). *Education Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizka, A. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 15–21.
- Setyaningsih, R., Suci, A. N., & Puspasari, F. A. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi di SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 18–23.
- Supriono, U., & Sapari, A. (2001). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Surabaya: SIC.